

# Evaluasi Sistem Pengelolaan Dana Bergulir di Kantor Sekretariat Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAG) dan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Ranto Peureulak

Yusriani <sup>1\*</sup>, Muhammad Jamil <sup>2</sup>

<sup>1\*,2</sup> Program Studi Keuangan dan Perbankan Nusantara, Akademi Keuangan Perbankan Nusantara, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Indonesia.

\*Correspondence email:  
yusrianiyus07@gmail.com <sup>1\*</sup>

Received: 20 March 2022  
Accepted: 12 May 2022  
Published: 30 June 2022

Full list of author information is  
available at the end of the article.

## Abstract

Revolving funds are a form of government intervention in the economic field in order to improve justice. One of the characteristics of revolving funds is that these funds are channeled to the community/community groups, charged back with or without added value, and re-rolled back to the community/community groups or known as revolving funds. The purpose of the Management of Activities of Revolving Fund Management System Office of the Secretariat of the Inter-gambling Cooperation Agency (BKAG) and the Unit (UPK) of Ranto Peureulak District The research method is a qualitative approach. This qualitative approach is used in order to obtain descriptive data in the form of written words from people or samples used as respondents. the results of practical work that have been described in previous chapters, the authors can draw a conclusion from the Evaluation of the Revolving fund management system at the secretariat office of the Inter-gambling Cooperation Agency (BKAG) and the Activity Management Unit (UPK) of Ranto Peureulak District, which is very useful for the sub-district community Ranto Peureulak.

**Keywords:** Revolving Fund; Management System; Activity Management.

## Abstrak

Dana bergulir adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah di bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan keadilan. Salah satu ciri khas dana bergulir adalah dana ini disalurkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/ kelompok masyarakat atau dikenal dengan istilah revolving fund. Tujuan Pengelolaan Kegiatan Sistem Pengelolaan Dana Bergulir Kantor Sekretariat Badan Kerja Sama Antar Gampong (BKAG) dan Unit (UPK) Kecamatan Ranto Peureulak Metode penelitian adalah Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sampel yang digunakan sebagai responden. hasil kerja praktek yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat penulis menarik suatu kesimpulan dari Evaluasi Sistem pengelolaan dana Bergulir di kantor sekretariat badan Kerja Sama antar Gampong (BKAG) dan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Ranto Peureulak sangat bermanfaat untuk masyarakat kecamatan Ranto Peureulak.

**Kata Kunci:** Dana Bergulir; Sistem Pengelolaan; Pengelolaan Kegiatan.



## 1. Pendahuluan

Memanfaatkan dana bergulir yang diterima untuk meningkatkan tingkat usaha dan perkonomiman mereka. Apabila penyaluran dana bergulir kepada suatu masyarakat/kelompok masyarakat telah berhasil meningkatkan tingkat usaha dan perekonomian untuk dapat berjalan secara mandiri. Pendapatan BLU mencakup penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD, pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan kepada masyarakat, hibah yang tidak terikat, dan hasil kerjasama BLU dengan pihak lain atau hasil usaha lainnya. Belanja BLU terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran. Pengelolaan belanja BLU diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.

Pada tahun 2009, dana bergulir yang disalurkan sebesar Rp911 miliar, tahun 2010 sebesar Rp5.333 miliar, tahun 2011 sebesar Rp8.798,1 miliar, tahun 2012 sebesar Rp7.043,4 miliar, serta pada tahun 2013 sebesar Rp3.335,8 miliar. Akan tetapi dari alokasi dana bergulir yang cukup besar tersebut, realisasi penyaluran kepada penerima hanya mencapai 61,3%. Penyaluran dana bergulir pada masing-masing BLU dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 hanya meningkat 19%. Penyaluran terbesar terjadi di Pusat Pembiayaan Perumahan dengan 91,81% (naik 29,0% dari tahun 2011). Sementara itu, penyaluran terendah terjadi pada dana bergulir geothermal di PIP yang masih tetap belum menyalurkan sama sekali dana bergulir yang diterima (realisasi penyaluran 0%). Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulisingin memfokus lebih lanjut mengenai Evaluasi Sistem Pengelolaan Dana Bergulir di Kantor Seketariat Badan Kerja Sama Antar Gampong (BKAG) dan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Ranto Peureulak.

## 2. Metode

Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sample yang digunakan sebagai responden penelitian (Muntahanah, 2014). Adapun metode pengumpulan data yang penulisan gunakan adalah Observation (Pengamatan Langsung) yaitu mengadakan pengamatan langsung ke satuan pengurus/staf pada Kantor Badan Pusat Statistik Aceh Timur, Interview (Wawancara Langsung) yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pejabat desa, Library Research (Penelitian Kepustakaan) Penulisaan yang bersumber dari buku-buku, Koran dan sumber lainnya yang ada hubungan dengan penelitian ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Hasil Evaluasi Sistem Pengelolaan dana Bergulir di kantor seketariat badan Kerja Sama antar Gampong (BKAG)

Dalam memberikan dukungan terhadap PNPM Mandiri pendesaan yang mempunyai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi RTM dalam bentuk kegiatan SPP (untuk mendapatkan pemodalan), peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif (menyediakan pendanaan untuk peningkatan kapasitas kelompok usaha), kegiatan peningkatan kapasitas usaha kelompok perempuan (menyediakan hibah untuk pendanaan sarana usaha dan modal kerja untuk 1 siklus usaha). Seluruh dana program yang berasal dari BLM-PPK, BLM-PNPM mandiri perdesaan dan sumber dana ini yang disalurkan oleh masyarakat melalui UPK, digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok yang bersifat pinjaman dalam satu wilayah kecamatan. Tujuan kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM mandiri perdesaan yaitu :

- 1) Memberikan kemudahan akses pendanaan ekonomi rumah tangga baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha
- 2) Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program
- 3) Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir ditingkat wilayah pendesaan
- 4) Meningkatkan peran kelembagaan pengelola kegiatan dana bergulir (UPK, BP-UPK, tim verifikasi, tim pendanaan dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan.

- 5) Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga terkait pemodal usaha melalui kelompok pemanfaat.

Pengelolaan kegiatan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir dengan ketentuan dasar sebagai berikut :

- 1) Pelestarian kegiatan dana bergulir
- 2) Kemudahan akses pendanaan usaha bagi RTM
- 3) Pelestarian prinsip pengelolaan
- 4) Kepemilikan
- 5) Pelestarian kelembagaan
- 6) Pengembangan kelompok
- 7) Akuntabilitas dan transparansi
- 8) Pengelolaan rekening

Mekanisme pengelolaan merupakan tahapan-tahapan yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana bergulir mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban. Akses dana bergulir mempunyai karakteristik yang berbeda dengan akses dana BLM hal ini didasari oleh beberapa kondisi di antaranya : sifat kepemilikan dana oleh masyarakat, model kompetisi antar kelompok peminjam bukan antar kegiatan, kelembagaan yang terlibat dengan mekanisme hubungan langsung antara kelompok peminjam dan UPK, dan kebutuhan pola perguliran yang sesuai. Perbedaan karakteristik tersebut tidak diperbolehkan bertentangan dengan tujuan, prinsip, ketentuan dasar program, sehingga dibutuhkan mekanisme yang sesuai yang didasari oleh :

- 1) Kelembagaan pengelola
- 2) Ketentuan pendanaan
- 3) Tahapan pengelolaan
- 4) Penetapan persyaratan

Berdasarkan subyek pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dalam program dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu internal dan eksternal. Pemantauan, pengawasan dan evaluasi internal didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam program yaitu :

- 1) Masyarakat dan pelaku di desa
- 2) Fasilitator dan konsultan di kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional
- 3) Aparat kecamatan
- 4) Tim koordinasi kabupaten, provinsi dan pusat.

Untuk kegiatan pemantauan dan pengawasan eksternal, program melibatkan secara khusus beberapa lembaga, yaitu :

- 1) Lembaga swadaya masyarakat melalui kegiatan PBM (Province Based Monitoring)
- 2) Wartawan melalui kegiatan program pelibatan media massa dalam pemantauan (PPMMP)
- 3) Badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP)
- 4) Badan pengawas daerah (Bawasda)

Berdasarkan waktu, kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan dalam program adalah :

- 1) Secara rutin
- 2) Secara berkala
- 3) Akhir kegiatan atau siklus
- 4) Secara insidental

Setelah melakukan penelitian dapat dilihat bahwa Evaluasi Sistem Pengelolaan dana Bergulir di kantor seketariat badan Kerja Sama antar Gampong (BKAG)

- 1) Efektivitas

Efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif bila mana kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik, yang tidaklain dalam kegiatan pengelolaan dana desa kecamatan Ranto Pereulak. Dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap kebijakan mempunyai pencapaian target yang

hendak dan ingin dicapai. Adapun suatu perubahan yang ingin dicapai dari "Evaluasi Sistem Pengelolaan dana Bergulir di kantor seketariat badan Kerja Sama antar Gampong (BKAG)", harapan pemerintah dan masyarakat menginginkan suatu perubahan yang lebih baik dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan

2) Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu bentuk kriteria didalam proses Evaluasi Sistem Pengelolaan dana Bergulir di kantor seketariat badan Kerja Sama antar Gampong (BKAG). Efisiensi disini merupakan seberapa banyak usaha yang dilakukan didalam mencapai hasil yang diinginkan. Didalam hal ini hasil yang diinginkan merupakan nilai wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh pihak kecamatan Pereulak

3) Kecukupan

Kecukupan merupakan salahsatu bentuk kriteria pula didalam proses evaluasi kegiatan "Evaluasi Sistem Pengelolaan dana Bergulir di kantor seketariat badan Kerja Sama antar Gampong (BKAG). Kecukupan disini merupakan suatu nilai dari seberapa Jauhnya pencapaian dari sebuah hasil yang diinginkan. Dalam hal ini hasil yang diinginkan merupakan kesesuaian proses kegiatan pembangunan dengan kepuasan dan tingkat kebutuhan tingkat masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kecamatan Ranto Pereulak biasanya mengharapkan suatu perubahan kondisi yang lebih baik sesuai dan dapat memuaskan baik bagi pemerintah dea puser maupun masyarakat desa.

4) Perataan

Perataan berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan dapat terdistribusikan pelayanan atas dasar kriteria persamaan manfaat yang diberikan pada proses pengelolaan dana desa. Pihak pemerintah kecamatan Ranto Peurelak seharusnya dapat memberikan pembangunan tanpa adanya perbedaan sehingga proses pengelolaan dana desa menjadi bagian program yang memajukan desa dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Kebijakan pemerintah berupaya untuk menunjukan dan menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan terdapat beberapa jenis manfaat sebagai dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak.

5) Responsifitas

Responsifitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok - kelompok masyarakat tertentu. Proses pengelolaan dana desa diharapkan mampu menjadi respon pemerintahan desa agar pengelolaan dana desa bisa lebih maksimal, memberikan hasil yang baik, memberikan kemudahan dan sesuaidengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat desa. Berdasarkan hasil penelitian, Pengelolaan dana desa harus diketahui oleh masyarakat karena masyarakat harus ikut mengawasi pengelolaan dana desa dan desa wajib untuk mengumumkan pengalokasian penggunaan dana desa kepada masyarakat akan tetapi masyarakat tau sebatas pembangunannya saja, sedangkan dalam pengelolaannya masyarakat kurang mengetahui dalam artian dana desa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa transparansi dana desa belum transparan pada tahun 2018, transparansi dana desa hanya dimusyawarah desa dan belum transparansi ditekankan seperti terpajang di baliho- baliho dan diumumkan pada masyarakat, dana desa baru ditekankan transparasinya pada tahun 2019. Dan dana desa tahun 2018 tidak bisa diakses oleh semua orang dalam artian terbatas secara transparansi dan desa serta pengelolaan dana desa di desa 2018 belum transparan dan besaran anggaran atau pagu anggaranya tidak diketahui dan diberitahukan.

6) Ketepatan

Berkenaan dengan seberapa jauh hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Proses pengelolaan dan desa diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat desa dan setiap pembangunan infrastrukturnya dapat berguna bagi masyarakat.

### 3.2 Pembahasan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Staf- staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing- masing, antara lain: sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (Kepala Dusun) (Kirana, 2018) bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 tahun 2007 (Dewanti *et al.*, 2016) Proses pengelolaan dan desa diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat desa dan setiap pembangunan infrastrukturnya dapat berguna bagi masyarakat. Bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan dan pendapatan di daerah pedesaan (Kislat & Menkhoff, 2011) Sistem Pengelolaan dana Bergulir di

kantor sekretariat badan Kerja Sama antar Gampong (BKAG) dan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Ranto Peureulak sangat bermanfaat untuk masyarakat kecamatan Ranto Peurelax, Dana bergulir adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah di bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan keadilan. Salah satu ciri khas dana bergulir adalah dana ini disalurkan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisa data yang ada dalam rangka penulisan Laporan Kerja Praktek (LKP) ini, baik tentang teori maupun hasil kerja praktek yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan dari Evaluasi Sistem Pengelolaan dana Bergulir di kantor sekretariat badan Kerja Sama antar Gampong (BKAG) dan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Ranto Peureulak sangat bermanfaat untuk masyarakat kecamatan Ranto Peurelax.

#### **Referensi**

- Dewanti, E. D. W., Sudarno, & Kurrohman, T. (2016). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang) Financial Management Planning Analysis For Villages Fund In Boreng Village (Case Study at Boreng Lumajang Regency).
- Muntahanah, Siti. 2014. Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa DiKecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Purwokerto: Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Kirana. (2018). Analisis Perencanaan Pengelolaan Arus Kas Keuangan Desa Moncongloe Kabupaten Maros. Skripsi.
- Kislat, Carmen & Menkhoff Lukas. 2011. The Village Fund Loan: Who Gets Keeps It and Loses It. Journal Departemen of Economics, Leibniz University Hannover, Konigsworther Platz 1, D-30167 Hannover. URL: [https://diskussionspapiere.wiwi.uni-hannover.de/pdf\\_bib/dp-490.pdf](https://diskussionspapiere.wiwi.uni-hannover.de/pdf_bib/dp-490.pdf).
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang no. 32 Tahun 2004 tentang Daerah Widjaja, HAW. 2003.

#### **How Cites**

Yusriani, & Jamil, M. (2022). Evaluasi Sistem Pengelolaan Dana Bergulir di Kantor Sekretariat Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAG) dan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Ranto Peureulak. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1), 10–14. <https://doi.org/10.58477/ebima.v1i1.15>.

#### **Publisher's Note**

Yayasan Pendidikan Mitra Mandiri Aceh (YPPMA) remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations. Submit your manuscript to YPMMA Journal and benefit from: <https://journal.ypmma.org/index.php/ebima>.